

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk di kota besar di Indonesia saat ini cukup besar, sehingga terdapat berbagai masalah yang cukup besar pula. Di antaranya: masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Salah satu masalah sosial yang sering dijumpai di kota-kota besar adalah masalah anak jalanan yang keberadaannya seharusnya dipelihara oleh Negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan.

Seharusnya dalam sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa sekaligus masa depan bangsa, sehingga anak-anak berhak atas kelangsungan hidup dan juga tumbuh kembang. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat, hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi, sebagai amanah dan sebagai salah satu anggota keluarga, maka anak harus sudah sepantasnya dijaga dan dipelihara dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama.

Selain itu anak adalah sebagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, dalam kedudukan yang demikian anak memiliki peranan strategis dan

mempunyai ciri dan sifat khusus, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam pelaksanaan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak memerlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai (Darwin, 2007: 2).

Fakta yang ada menunjukkan bahwa kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan dan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah serta masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini nampaknya masih jauh dari harapan. Berbagai permasalahan sosial anak ini terjadi karena lebih mengarah pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, yaitu mengenai kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kondisi ekonomi keluarga, keluarga broken home, ataupun dari keluarga disharmonis. Dengan demikian kondisi mental dan psikis anak akan mengalami goncangan, sehingga akan mudah sekali terpengaruh oleh kondisi lingkungannya, terutama lingkungan yang bersifat negatif. Hal ini sebenarnya sebagai wujud dari ketidakpuasan terhadap kondisi-keluarga yang tidak mendukung terhadap tumbuh kembang anak secara wajar. Dari berbagai permasalahan sosial anak tersebut di atas yang paling menonjol adalah mengenai anak jalanan. Walaupun keberadaan anak jalanan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun`1980-an, namun semenjakterjadinya knsis multidimensi yang-melanda bangsa Indonesia pada pertengahan tahun 1997, perkembangannya sampai saat ini cukup cepat sehingga perlu segera dapat diatasi

secara tepat dan cepat pula. Menurut data dari Pusat-Data dan Informasi- (Pusdatin) Departemen Sosial RI, jumlah anak jalanan dari tahun ke-tahun menunjukkan peningkatan, tahun 2000 berjumlah 59.517 anak, tahun 2002 sebanyak 94.674, dan pada tahun 2004 Isebanyak 98.113 anak, serta tersebar terutama di kota-kota besar (Andari, 2006: 6).

Menurut Nasution dan Fuad (2007:63) anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Tidak sedikit anak jalanan yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa. Tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang. Bentuknya berupa kenakalan yang mengarah pada tindak kriminal, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan.

Tempat bekerja anak jalanan biasanya di jalan-jalan yang dianggap strategis dan lokasi dekat dengan rumah tetapi terkadang adanya juga anak jalanan yang melakukan pekerjaan jauh dari rumah. Hal ini karena tempat-tempat strategis di dekat rumah telah diisi oleh anak-anak jalanan yang lain. Anak jalanan yang masih terikat dengan keluarga biasanya masih sekolah, dan berkerja setelah sekolah atau waktu hari libur. Anak anak jalanan yang demikian bekerja karena tekanan ekonomi keluarga. Bekerja sebagai anak jalanan mampu membantu ekonomi keluarga walaupun hanya sedikit. Artinya hasil jerih payah anak jalanan dapat digunakan untuk biaya keperluan sekolah.

Anak jalanan yang masih terikat oleh keluarga biasanya memiliki jadwal yang teratur. Apabila pendapatan yang diperoleh dianggap sudah cukup anak jalanan akan pulang. Pendapatan yang diperoleh setiap harinya tidak sama, ada hari yang dianggap ramai ada pula hari yang dianggap sepi. Begitu pula setiap harinya ada jam yang dianggap ramai adapula jam yang dianggap sepi. Atas dasar itulah pendapatan anak jalanan menjadi tidak tentu.

Semakin meningkatnya jumlah anak jalanan memberikan indikasi bahwa pekerjaan anak jalan ini cukup bahkan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jenis pekerjaan anak jalanan bermacam macam mulai dari penjual koran, pengamen penjual asongan, pengemis, dan lain sebagainya. Disamping bekerja di tempat yang relatif dekat dengan tempat tinggal, anak jalanan juga menempati tempat tempat yang strategis misalnya *trafict light* stasiun, alun-alun, pusat pusat perbelanjaan maupun fasilitas fasilitas umum yang ramai.

Mengingat bahwa kondisi anak jalanan saat ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan berlalu-lintas karena di samping mereka beraktivitas sebagai pengamen maupun pengasong (pekerja informal) kadang kala juga berbuat kriminal walaupun secara kecil-kecilan. Kadangkala kehidupan di jalanan tidak hanya memberikan kesempatan untuk memperoleh penghasilan (mencari nafkah). Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor pendorong kondisi kemiskinan dan atau konflik keluarga, serta lingkungan tempat tinggal yang kurang kondusif. Faktor penarik berupa kesempatan cari nafkah dan daya tarik kehidupan kota, serta kehidupan bebas bersama *peer group* anak jalanan juga menghadapkan pada resiko tinggi dari kemungkinan kecelakaan lalulintas, interaksi dengan para

preman, pelacur jalanan, waria, lelaki homo seksual, penyalahguna atau penjual obat terlarang, dan narkoba. Anak-anak rentan terhadap kemungkinan eksploitasi pihak lain secara ekonomik maupun seksual (Andari, 2006: 6).

Beberapa permasalahan sosial anak jalanan tersebut sangat memerlukan perhatian dan perlindungan secara khusus, karena merupakan bagian dari masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena ketidakmampuan negara dalam menghargai, melindungi, dan memenuhi atas hak anak jalanan, sehingga menyebabkan anak jalanan tidak dapat mengakses pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, hukum, dan sosial. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak jalanan termasuk kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan baik dari pemerintah, masyarakat, maupun dari keluarganya.

Pasal 59 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 menyatakan:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal di atas menunjukkan bahwa pemerintah dan pihak lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat, komnas anak, dan lainnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum. Perlindungan

hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Arief, 2008:155).

Relevansinya dengan pendidikan kewarganegaraan, masyarakat sebagai warga negara yang baik harus mentaati peraturan yang berlaku khususnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga masyarakat tidak membiarkan anak-anak berada di jalanan. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Hal ini karena ditinjau dari sudut pendidikan kewarganegaraan, anak-anak jalanan tersebut akan terlantar pendidikannya. Anak-anak jalanan kurang mendapat perhatian, pengawasan, dan pendidikan yang layak sehingga tidak sejalan dengan tujuan pendidikan pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk membangun dan menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang mencintai tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: /a/ perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; /b/ perlindungan anak dalam proses peradilan; /c/ perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); /d/ perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; /e/ perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi,

perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); /f/ perlindungan terhadap anak-anak jalanan; /g/ perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; /h/ perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan (Arief, 2008:156).

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak Jalanan (Studi Kasus di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2013)."

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang masalah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya
2. Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya Pasal 59 yang berbunyi: pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
3. Perlindungan yang diberikan terhadap anak-anak dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil anak jalanan di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga?
2. Bagaimanakah implementasi Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak jalanan di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga?
3. Hambatan-hambatan apa sajakah yang muncul dalam upaya perlindungan terhadap anak jalanan di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan profil anak jalanan di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.
2. Mendeskripsikan implementasi Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 terhadap perlindungan anak jalanan di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.
3. Mendeskripsikan hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya perlindungan terhadap anak jalanan di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Skripsi ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang perlindungan anak, terutama anak jalanan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian berikutnya
 - b. Skripsi ini dapat dijadikan acuan bagi para relawan sosial, masyarakat serta pemerintah dalam mengatasi masalah anak jalanan

2. Manfaat praktis

- a. Bagi anak jalanan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada anak jalanan agar dapat tumbuh dengan lebih baik sehingga bermanfaat bagi dirinya sendiri.
- b. Bagi pemerintah, agar dapat lebih memperhatikan keberadaan anak jalanan dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan hak yang sama dengan warga negara yang lain.
- c. Bagi lembaga swadaya masyarakat, diharapkan dari pihak LSM dalam bidang perlindungan anak agar dapat lebih memperhatikan kesejahteraan anak-anak jalanan dengan memberikan pelayanan sosial bagi anak jalanan.

F. Daftar Istilah

1. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya
2. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah instrumen khusus masalah anak-anak, yang di dalamnya mengatur prinsip-prinsip dalam upaya melindungi hak-hak anak sebagaimana mestinya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.